

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan hukum pengangkatan anak yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Negeri, serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Mbn oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal pokok, yaitu: (1) mengapa pengangkatan anak yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Negeri, dan (2) bagaimana dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama dalam perkara pengangkatan anak bagi umat Islam, namun Pengadilan Negeri Muara Bulian tetap memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, serta Surat Edaran Mahkamah Agung. Putusan tersebut didasarkan pada asas perlindungan terbaik bagi anak, serta adanya tanggung jawab moral dan sosial dari orang tua angkat terhadap anak. Penelitian ini mengungkapkan adanya konflik norma dan dualisme kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta pemahaman yang menyeluruh di kalangan aparat peradilan terhadap yurisdiksi masing-masing lembaga guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang optimal bagi anak.

Kata Kunci : Anak, Pengangkatan Anak, Kewenangan Pengadilan

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the legal reasons why the adoption of a Muslim child is carried out through the General Court, and the legal basis considered by the judge in Decision Number 3/Pdt.P/2017/PN Mbn issued by the Muara Bulian District Court. The research problems addressed are: (1) why is the adoption of a Muslim child processed through the District Court, and (2) what are the legal considerations underlying the court's decision to grant the adoption request filed by Muslim petitioners. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The results show that although Law Number 3 of 2006 on Religious Courts grants absolute authority to the Religious Court in matters of child adoption among Muslims, the Muara Bulian District Court accepted and granted the petition based on Article 39 of Law Number 35 of 2014 on Child Protection, Government Regulation Number 54 of 2007, and the Circular Letter of the Supreme Court. The decision was grounded on the principle of the best interest of the child, as well as the moral and social responsibilities of the adoptive parents. This research reveals a normative conflict and dualism of authority between the Religious and General Courts, potentially leading to legal uncertainty. Therefore, harmonization of regulations and increased awareness among judicial authorities regarding their respective jurisdictions are necessary to ensure legal certainty and optimal child protection.

Keywords : Children, Adoption, Court Authority